

KEADILAN KARL MARX: TILIKAN RODNEY G. PEFFER

Dr. Hieronimus Yoseph Dei Rupa OFM

(Dosen Filsafat STF Driyarkara Jakarta)

Para filsuf hanya telah menginterpretasi dunia dalam berbagai cara; (padahal) intinya adalah mengubahnya (Karl Marx, Theses on Feuerbach, XI)

Kutipan Marx dari *Theses on Feuerbach XI* menunjukkan secara gamblang urgensi pemikiran dan refleksi filosofis yang datang dari dan terarah pada realitas yang konkrit dengan *locus* keseharian hidup masyarakat. Filsafat diajak untuk peka dan terlibat dalam fenomena riil kehidupan sosial. Merasakan kegelisahan dan pergulatan masyarakat (dan dunia) serta terlibat di dalamnya untuk *mengubahnya* menjadi lebih adil dan setara, sebuah masyarakat tanpa kelas, adalah tugas utama pemikiran filosofis *ala* Marx.

Salah satu persoalan abadi dalam realitas hidup bersama adalah fakta adanya ketidakadilan. Sistem ekonomi kapitalisme dengan neoliberalismenya telah menciptakan ketidaksetaraan dalam hidup bermasyarakat. Alih-alih menjadi solusi dalam menciptakan kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan, sistem ekonomi neoliberalisme yang mendominasi sistem ekonomi global saat ini telah menghancurkan kehidupan manusia dan alam (Bdk. *Fratelli Tutti*, 168-169).

Dalam situasi tersebut, diskursus keadilan dan kesetaraan hidup sosial menjadi krusial. Tentu saja perlu diakui bahwa keadilan merupakan tema abadi. Keabadian problem ini terletak pada realitas kehidupan bersama yang “selalu” diwarnai dengan realitas pengalaman ketidakadilan. Sejak jaman Yunani Kuno dengan pemikiran Plato (*Republic*, 380-370 BC) hingga pemikiran modern-kontemporer, John Rawls (*A Theory of Justice*, 1971), refleksi dan diskusi tentang keadilan telah dan sedang berlangsung. Ini menunjukkan secara gamblang realitas dan praktik-praktik ketidakadilan masih mendominasi ruang hidup kita baik ruang privat maupun ruang publik.

Karl Marx (1818-1883) merupakan salah seorang filsuf yang mengamati dan mengalami

realitas ketidakadilan. Dalam sistem kapitalis dengan peran sentral kaum borjuis yang menguasai modal dan alat-alat produksi, Marx menemukan praktik-praktik alienasi dan eksploitasi serta ketidaksetaraan dalam hidup bersama. Oleh karena itu, ia berupaya menunjukkan pemikirannya yang *mengubah* situasi “ketidakadilan” ini kepada terciptanya kesetaraan sosial atau masyarakat tanpa kelas (baca: “keadilan”).

Tulisan ini berupaya untuk menunjukkan bahwa kendati Marx tidak menguraikan secara khusus tema keadilan dalam karya-karyanya, namun pemikiran kritisnya terhadap kapitalisme yang terarah kepada masyarakat tanpa kelas secara implisit menunjukkan upayanya untuk memperjuangkan “keadilan”. Pada bagian pertama kita akan mengkaji tiga penafsiran terhadap tema keadilan pada pemikiran Marx. Lalu pada bagian kedua akan diuraikan keadilan Marx dalam uraian Rodney Peffer.

TIGA PENAFSIRAN

Pada masanya, Marx mencermati perkembangan kapitalisme yang membawa konsekuensi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Masyarakat kelas terbentuk sebagai konsekuensi logis dari kapitalisme. Dominasi modal dan penguasaan sarana produksi mengakibatkan gap yang semakin lebar antara kaum borjuis/pemilik modal dan kaum proletar/kaum pekerja (=buruh). Dalam realitas tersebut, Marx berupaya memperjuangkan sebuah masyarakat tanpa kelas. Masyarakat sosialisme inilah yang merupakan tujuan dari pemikiran dan tindakan filosofisnya. Bagi Marx, dapat dikatakan bahwa “keadilan” *tercapai* ketika masyarakat tanpa kelas *terwujud*.

Pro kontra tema keadilan dalam pemikiran Marx ditunjukkan dalam tiga interpretasi terhadap karya-karya Marx. Konsekuensi logis dari tiga penafsiran yang akan diuraikan dalam bagian ini adalah terkelompoknya para pemikir sosialisme *ala* Marx dalam tiga kelompok pula. Titik perbedaan penafsiran dari ketiga kelompok ini adalah ketidaksepakatan atas konsep-konsep pemikiran Marx seperti alienasi, eksploitasi dan kesetaraan sebagai kategori moral.

Kelompok pertama adalah para pemikir seperti Allan W. Wood dan Robert Truker yang mengamini bahwa Marx tidak menguraikan secara khusus tema keadilan dalam karya-karyanya. Bagi mereka karya-karya Marx merupakan upaya mendeskripsikan dan menganalisis kapitalisme (modal dan tenaga kerja) serta bagaimana dampak-dampak dari proses kapitalisme yang terarah kepada sosialisme. Bagi Truker, Marx berupaya mengharmonisasikan modal dan tenaga kerja yang terpisah dalam sistem kapitalisme. Oleh karena itu, pemikiran filosofis Marx tidak terkait dengan ide keadilan distributif (*Philosophy and Myth in Karl Marx*, 1961). Dalam pembacaan Wood, karya-karya Marx berupaya menunjukkan konsep-konsep eksploitasi dan alienasi secara deskriptif dan bukan secara moral. Dalam kapitalisme, praktik-praktik alienasi dan eksploitasi *sewajarnya* terjadi sehingga tidak ada penghukuman dan klaim “ketidakadilan” dalam karya-karya Marx. Kondisi tersebut itulah yang menjadi ciri sistem kapitalisme. Namun demikian, Wood mengklaim pula bahwa Marx seorang relativis moral yang radikal sehingga Marx memahami keadilan bergantung pada periode historis dimana seseorang hidup dan model produksi pada periode tersebut. Misalnya, praktek perbudakan (*slavery*) dan penguasaan modal oleh segelintir orang adalah praktek yang “adil” dalam model produksi sistem kapitalisme (Wood, *Karl Marx*, 2004; Wood, *Marx on Right and Justice: A Reply to Husami*, 1979)

Kelompok kedua mengambil jalan tengah. Mereka adalah Allen Buchanan, Stevan Lukes,

George Brenket. Buchanan menafsirkan bahwa Marx mempersoalkan aspek distribusi yang tidak adil menurut konsep keadilan kapitalisme itu sendiri. Menurut kelompok ini, dalam masyarakat sosialis akan terwujud kehidupan bersama yang berkelimpahan sehingga “melampaui” kondisi keadilan (Allen Buchanan, *Marx and Justice: The Radical Critique of Liberalism*, 1982; Allen Buchanan, *Exploitation, Alienation, and Injustice*, 1979). George Brenket menunjukkan bahwa Marx mengkritik kapitalisme dari sebuah perspektif moral, yakni kebebasan. Baginya kapitalisme tidak memberikan ruang bagi terealisasinya kebebasan. Padahal kebebasan adalah ruang bagi keadilan (George Brenket, *Freedom and Private Property in Marx*, 1979). Lukes memahami bahwa bagi Marx kapitalisme dan keadilan secara internal kompleks dan diorganisasikan secara hierarki. Fase tertinggi dalam sosialisme adalah keadaan dimana tidak ada lagi masyarakat kelas sehingga dalam keadaan tersebut realitas hidup sosial melampaui keadaan masyarakat yang adil karena tidak ada lagi perjuangan akan hak dan punahnya egoisme. Dalam pandangan ini, kapitalisme tidak dilihat dalam perspektif adil atau tidak adil, tetapi sebagai kondisi inferior dibandingkan dengan masyarakat dalam sosialisme Marx (Stevan Lukes, *Marxism and Morality*, 1985).

Kelompok ketiga yang mendukung penafsiran bahwa Marx mengartikulasikan konsep keadilan secara eksplisit dan implisit dalam karya-karyanya adalah pemikir-pemikir seperti G. A. Cohen, John Lester, Norman Geras dan Rodney G. Peffer. Bagi mereka, karya-karya Marx yang mengekspresikan secara eksplisit kritik terhadap kapitalisme dan terarah kepada sosialisme, menunjukkan secara gamblang bahwa masyarakat sosialisme adalah wujud masyarakat yang lebih adil. Dalam tatanan masyarakat tanpa kelas, dimana hak milik pribadi atas alat-alat produksi telah dihapus, maka keadilan secara intrinsik tercipta di dalamnya. Cohen bahkan berargumen bahwa keadilan adalah tema sentral dalam ajaran Marx. Bagi Cohen, Marx mengkritik praktik ketidakadilan yang terletak pada eksploitasi dan penguasaan sarana-sarana produksi

secara pribadi dalam sistem kapitalisme (G. A. Cohen, *History, Labour, and Freedom: Themes from Marx*, 1988). Jon Elster mengafirmasi pula kritik Marx terhadap kapitalisme menunjukkan bahwa kapitalisme adalah sistem yang tidak adil dan bukan bahwa keadilan tidak eksis. Lebih jauh, ia menunjukkan bahwa masyarakat tanpa kelas (sosialisme) adalah sebuah masyarakat yang adil secara penuh. Dua prinsip yang mengkarakterisasi sosialisme, dengan merujuk pada karya Marx *The Critique of the Gotha Programme* (1985), adalah terwujudnya prinsip kontribusi, yaitu “kepada masing-masing menurut kontribusi kerjanya” dan prinsip komunisme “Dari masing-masing menurut kemampuannya, kepada masing-masing menurut kebutuhannya” (Jon Elster, *Making Sense of Marx*, 1985). Norman Geras mengklaim bahwa Marx adalah seorang filsuf moral pula. Baginya, pemikiran Marx yang mengkritik kapitalisme berasal dari teori standar moral (baca: keadilan) universal (Norman Geras, *The Controversy About Marx and Justice*, 1985; Norman Geras, *Bringing Marx to Justice: An Addendum and Rejoinder*, 1992). Sebagai seorang realis moral, Marx meyakini bahwa semua pernyataan-pernyataan moral bergantung pada kondisi-kondisi atau struktur ekonomi. Dalam konteks inilah, Marx mengkritik dan menghukum kapitalisme dalam perspektif moral (Valentin Stoian, *Property Owning Democracy, Socialism and Justice: Rawlsian and Marxist Perspectives on the Content of Social Justice*, 2014).

KEADILAN MARX

Perlu dicermati bahwa Marx, secara umum diterima, tidak memberi perhatian pada nilai moral normatif tentang keadilan. Ia tidak berupaya menciptakan sebuah teori tentang masyarakat sosial yang adil atau tidak adil. Bahkan, jika kita mencermati tulisan-tulisannya, ia juga tidak mengklaim bahwa kapitalisme dengan berbagai konsekuensi buruknya merupakan sistem ekonomi yang tidak adil atau adil. Sebaliknya, Marx menunjukkan secara jelas pentingnya nilai-kerja dan proses kapitalisme serta kesetaraan dalam hidup bermasyarakat atau sosialisme (Salvatore Veca, *A Proposito di Karl Marx*, 2018).

Rodney G. Peffer, dalam bukunya, *Marxism, Morality and Social Justice* (1990), menunjukkan bahwa kendati Marx tidak secara eksplisit mengklaim kapitalisme sebagai sistem yang tidak adil dan adanya kebingungan serta inkonsistensi dalam tulisan-tulisan Marx terkait tema keadilan tersebut, itu tidak berarti bahwa pemikir dan penafsir Marx “otomatis” mengabaikan uraian tema keadilan dalam pemikiran Marx. Baginya, mengapa Marx tidak mengklaim kapitalisme sebagai tidak adil karena Marx melihat sistem kapitalisme dari *perspektif internal* sistem tersebut. Marx mendeskripsikan dapur dan bangunan kapitalisme yang inheren dengan praktik eksploitasi dan alienasi. Ia tidak memberikan sebuah *penilaian moral* terhadap kapitalisme. Hal ini bisa dimengerti karena bagi Marx nilai atau prinsip-prinsip moral adalah produk dari kelas borjuis atau kapitalis. Namun demikian, dalam *perspektif eksternal*, menurut Peffer, praktik mendominasi, mengeksploitasi dan memiskinkan kehidupan manusia, tidak bisa tidak, dinilai tidak bermoral oleh para pemikir Marx. Pada titik ini, pembacaan teks dan konteks yang menyertainya tidak dipenjara oleh penulis asli (baca: Marx), melainkan diberi ruang relevansi dan kontekstualisasi (baca: kebaruan) dalam kehidupan yang lebih kompleks dan global saat ini. Tentu saja penafsiran dan aktualisasi tersebut tetap setia terhadap spirit asli pemikir.

Untuk artikel ini, kita membatasi uraian kita tentang keadilan dalam perspektif Marx dengan merujuk pada penafsiran dan penjelasan dari Peffer. Bagi Peffer, dalam karya-karya Marx kita dapat menemukan teori moral secara implisit. Ia membantah penafsiran dan klaim bahwa pemikiran Marx tidak pernah berkonsentrasi pada moralitas. Baginya, karya-karya Marx dan penafsiran para pengikut Marx terkait ekonomi politik mengafirmasi adanya prinsip-prinsip moral untuk hidup bersama. Peffer memberikan penafsiran sebuah teori moral dan sosial Marx, yakni sebuah teori yang menyediakan seperangkat prinsip atau standar moral untuk menilai realitas sosial dan, dengan demikian, menyediakan kriteria untuk memutuskan

mana perangkat sosial yang mungkin tepat bagi kehidupan bersama. Dengan kata lain, upaya Marx membangun masyarakat tanpa kelas (sosialisme) dengan menegasi kapitalisme meniscayakan, secara implisit, nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral untuk sistem sosialisme.

Lebih lanjut Peffer menjelaskan bahwa teori moral dan sosial Marx tersebut mengandaikan tiga premis. *Pertama*, teori ini didasari oleh semangat humanisme dan egalitarianisme radikal Marx. Bagi Marx, ciri alamiah manusia adalah hidup bersama dalam harmoni dan kesetaraan. Oleh karena itu, konflik sosial (baca: revolusi) merupakan konsekuensi logis dari sistem kapitalisme, yang merupakan faktor-faktor objektif eksternal sosial. Kondisi ketidaksetaraan akan kepemilikan modal, akan alat-alat produksi, dan akan akses “pincang” dalam sistem kapitalisme menyebabkan konflik sosial dan disharmoni dalam hidup bersama.

Kedua, teori didasarkan pada tesis-tesis empiris yang sangat penting dalam perspektif politik Marxis terutama teori Marx tentang kelas dan perjuangan kelas serta analisisnya terhadap kapitalisme. Prinsip-prinsip moral Marx didasarkan pada upayanya membangun sosialisme. Dalam masyarakat tanpa kelas, sebagaimana diidealkan Marx, praktik-praktik keterasingan dan eksploitasi kapitalisme tidak mendapat ruang dan menjadi lumpuh. Tentu saja, dalam tataran praktis, masih sulit melihat contoh konkrit kondisi masyarakat seperti ini. Oleh karena itu, Marx sering disebut “sosialis utopis” (*a utopian socialist*). Namun demikian, ide ini tetap memberi *insight* yang krusial dalam menemani sebuah sistem politik tertentu dalam kehidupan bersama, seperti sistem demokrasi yang sedang kita alami.

Ketiga, teori ini berusaha mempertahankan posisi politik normatif dasar Marxis yakni sosialisme dan revolusi sosial politik. Bagi Marx, dalam sistem kapitalisme yang ditandai dengan adanya persaingan dan kompetisi yang “tidak setara dan tidak adil” antara kelas pemilik modal/alat-alat produksi dan kelas buruh, maka revolusi sosial, cepat atau lambat,

akan terjadi. Dinamika internal sistem kapitalisme meracuni dan “membunuh” dirinya sendiri. Dalam kematiannya, sosialisme bangkit.

Bila kita mencermati rekonstruksi teori moral dan sosial Marx oleh Peffer dengan tiga premis sebelumnya maka tampak bahwa prinsip dasar dari penafsiran dan rekonstruksi sebelumnya adalah prinsip kebebasan. Atau dengan kata lain, teori yang menjadi standar moral dalam menilai realitas sosial dalam pemikiran Marx adalah kebebasan.

Bagi Peffer basis nilai kebebasan inilah yang mendasari kita dalam mengupayakan dan mengejar sebuah sistem kehidupan bersama yang menempatkan kebebasan maksimum dan kesempatan yang setara (baca: egalitarianisme) bagi semua individu tanpa terpenjara dalam kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, setiap anggota masyarakat dapat menentukan dirinya sendiri dan tidak didominasi atau dieksploitasi oleh yang lain. Dalam kondisi kesetaraan oportunitas, setiap individu dalam masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sosial yang memengaruhi hidupnya dan memiliki akses yang sama terhadap sarana untuk perealisasi dirinya. Ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat tanpa kelas atau sosialisme.

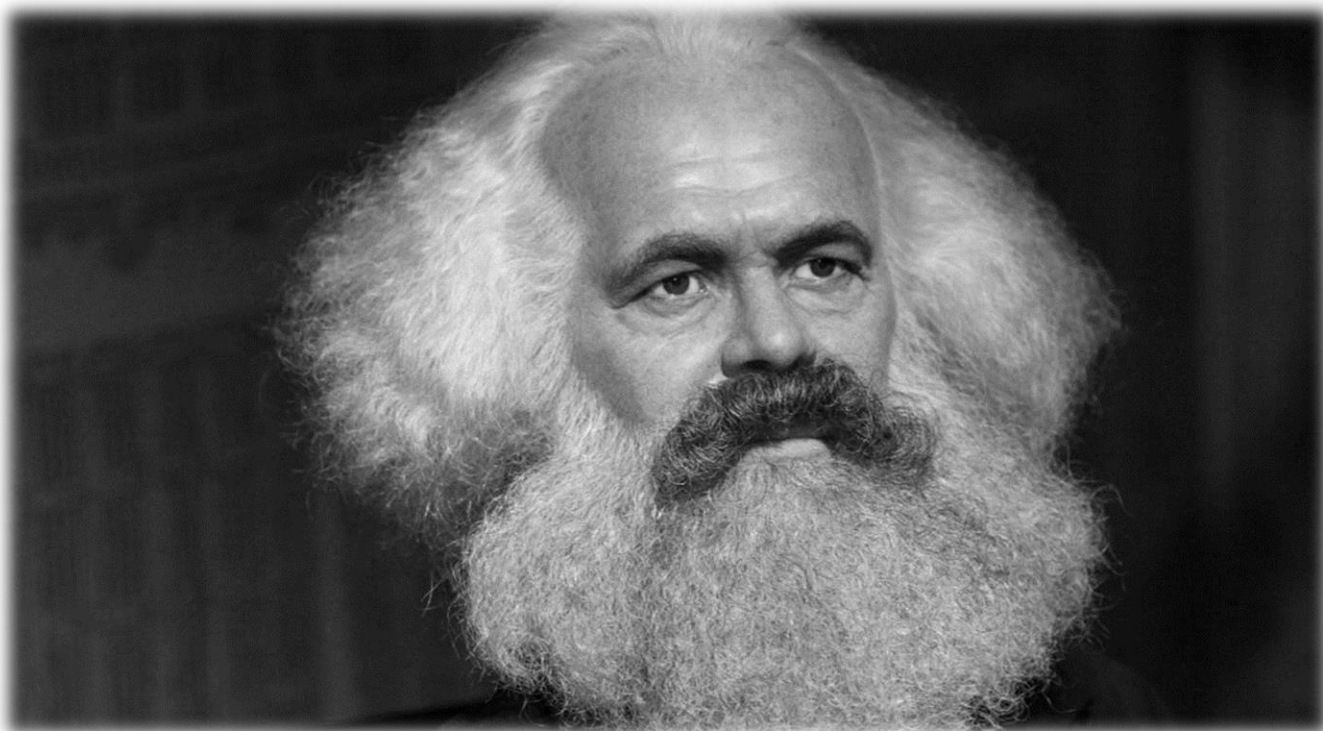
Sebaliknya, eksploitasi dalam kapitalisme, menurut Peffer, menghancurkan ajaran dan prinsip Marx terkait kebebasan yang setara secara maksimal. Dalam eksploitasi kapitalisme, kaum borjuis berupaya memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya. Berdasarkan tujuan tersebut, hukum pasar yakni hukum tawar-menawar di pasar menjadi yang pertama dan terutama (Frans Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, 2018). Dalam proses tawar-menawar tersebut, kebebasan menjadi niscaya. Namun karena posisi antara kedua kelas tidak setara dan tidak berimbang maka kebebasan keduanya pun berbeda, kaum pemodal memiliki akses *tak terbatas* dan kaum buruh memiliki ruang gerak *yang terbatas*. Kebebasan tidak maksimum dan

tidak egaliter karena perbedaan interes. Kedua belah pihak melakukan interaksi ekonomi dengan memperjuangkan kepentingan masing-masing. Pemilik produksi berusaha agar hasil produksi dijual dengan harga yang tinggi sedangkan konsumen berupaya mendapatkan kebutuhannya dengan harga yang murah. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini, pola relasi kehidupan dalam masyarakat juga diukur lewat kepentingan-kepentingan ekonomi. Sistem-sistem tradisional dihancurkan. Yang terpenting adalah keuntungan sebesar-besarnya yang diperoleh lewat persaingan yang bebas tanpa intervensi atau pembatasan dari otoritas tertentu seperti raja atau negara, misalnya (*Manifesto of the Communist Party, 1848*).

Jadi dalam perspektif Marx, menurut Peffer, keadilan didasarkan pada kebebasan sebagai determinasi-diri (*freedom as self-determination*), komunitas manusia (*human community*), dan realisasi-diri (*self-realization*). Kebebasan dan realisasi diri meniscayakan adanya kesetaraan (baca: egalitarianisme) dalam akses dan distribusi. Dengan kata lain, Marx menuntut keadilan dalam pemahaman bahwa perlunya setiap individu dalam

masyarakat untuk memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam mengakses dan mendistribusikan barang-barang produksi dan hal lainnya demi merealisasikan dirinya sendiri sebagai manusia yang bebas. Keadilan ini merupakan sebuah standar atau ukuran internal dalam masyarakat tanpa kelas. Oleh karena itulah, masyarakat tanpa kelas atau sosialisme dimana kepemilikan pribadi hilang, maka terwujud keadilan.

Kendati konsep ini terkesan utopis, hingga saat ini belum terwujud, namun konsep keadilan ini membuka diskusi dan kritik terhadap pentingnya kebebasan dan kesetaraan akses terhadap distribusi barang-barang produksi dan kebutuhan setiap individu dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Perbedaan kesempatan untuk mengakses barang-barang dan hal-hal yang dibutuhkan agar masyarakat mampu merealisasikan dirinya, praktik eksploitasi dan alienasi dalam relasi dominasi, yang kaya terhadap yang miskin, mencederai rasa keadilan dalam hidup bersama. Marx membangunkan kita selalu untuk mencermati secara baik realitas praktik-praktik ketidakadilan tersebut dalam sistem politik apapun, termasuk demokrasi.



SUMBER GAMBAR:

<https://guardian.ng/opinion/karl-marx-socialism-and-africas-second-liberation/>